

KERUGIAN NEGARA¹ MENCAPAI 4 MILIAR, POLDA KEPRI TETAPKAN TUJUH TERSANGKA KORUPSI PEMBANGUNAN PASAR MODERN NATUNA



batamtoday.com

Ditreskrimsus Polda Kepri telah menetapkan tujuh orang tersangka² dalam kasus dugaan korupsi³ pembangunan pasar modern di Ranai, Kabupaten Natuna. Para tersangka diduga menikmati uang negara⁴ sebesar Rp 4 miliar.

Penasihat hukum⁵ mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Natuna Minwardi, Bambang Yulianto mengatakan saat ini kliennya sedang menjalani pemeriksaan oleh Subdit III Tipikor Polda Kepri. "Lagi ada pemeriksaan tambahan," katanya saat ditemui di Mapolda Kepri, Kamis (23/8).

¹ Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)

² Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. (Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

³ Korupsi/Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

⁴ Uang Negara/Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)

⁵ Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

"Tersangka sudah tujuh orang, termasuk klien kami Minwardi, Asisten I Kabupaten Natuna," lanjutnya.

Secara singkat Bambang juga mengatakan seluruh tersangka saat ini telah ditahan⁶ di Rutan⁷ Polda Kepri. "Hari ini mereka juga masih diperiksa penyidik⁸, sama dengan klien kami," ujarnya.

Disampaikan Bambang, sejauh pendampingan yang dilakukan dalam pemeriksaan penyidik Tipikor, Minwardi mengaku tidak mendapatkan apa-apa. "Diakui dia tidak tahu karena dia hanya menandatangani, secara teknis dia tidak mengetahui dan tidak mendapatkan kelebihannya, tapi saat ini masih tahap pemeriksaan," terangnya.

Ia mengatakan dari pengakuan Minwardi, tidak mengetahui adanya kelebihan bayar tersebut. Karena mulai dari perencanaan hingga proyek itu dilaksanakan, Minwardi merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran⁹ dan Pejabat Pembuat Komitmen¹⁰.

"Dua jabatan dirangkap saat proyek berjalan. Selain itu, di tahun itu (2015) dia (Minwardi) mengakui banyak paket-paket proyek. Jadi tidak tahu, karena percaya dengan bawahannya. Tanda tangan saja," katanya.

Saat pengerjaan proyek tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan Natuna itu hanya dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)¹¹. Tidak banyaknya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi menjadi alasan Minwardi menjabat berbagai jabatan. "Sisi SDM. Kalau soal *markup* dan sebagainya, dia tidak tahu. Karena ia (Minwardi) merasa semuanya sudah sesuai," ungkapnya.

⁶ Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

⁷ Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

⁸ Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

⁹ Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. (Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

¹⁰ Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

¹¹ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. (Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

"PPTKnya bukan klien kami, ada lagi dibawahnya, saat ini juga turut ditahan di Polda," ujar Bambang kembali.

Dari pengakuan Bambang, PT Mangkubuan Perkasa (MP) hanya sebagai subkon atas proyek. Sedangkan proyek ini dimenangkan perusahaan lain, yaitu PT IK. Informasi yang diterima Batam Pos, penyidik Tipikor Polda Kepri masih melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka dan saksi¹². Keterangan para tersangka ini nantinya akan dicocokkan satu sama lainnya.

Kasus dugaan korupsi pembangunan pasar modern Natuna, sejak awal tahun telah diurut jajaran tindak pidana korupsi Polda Kepri. Dari audit¹³ BPKP¹⁴ ditemukan adanya kelebihan bayar kepada perusahaan pemenang tender saat itu, yaitu PT MP. Hal ini terungkap saat audit dilakukan tahun 2017.

Diberitakan sebelumnya, PT MP ini satu grup dengan kontraktor yang mengerjakan pembangunan gedung DPRD¹⁵ Natuna. Kucuran anggaran¹⁶ untuk pembangunan dua bangunan ini diberikan di tahun yang sama, baik pembangunan pasar modern maupun gedung DPRD Natuna. Kedua bangunan ini juga memiliki nasib yang sama, tidak pernah selesai pembangunannya.

Terkait penangkapan Manwardi dan enam tersangka lainnya, sumber di Mapolda Kepri membenarkannya. "Semuanya sudah ditahan. Saat ini dalam proses penyidikan¹⁷" ujarnya singkat.

¹² Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

¹³ Audit/Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara)

¹⁴ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional (Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)

¹⁵ DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014)

¹⁶ Anggaran yang dimaksud adalah APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), yaitu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)

¹⁷ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Beberapa waktu lalu, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menuturkan adanya kelebihan bayar sebanyak Rp 5 miliar atas pembangunan proyek pasar modern dan Gedung DPRD Natuna itu.

”Temuan¹⁸ itu harus dikembalikan, pemenang gedung DPRD mengembalikan kelebihan bayar dengan dicicil. Tapi ada regulasi terkait pengembalian ini. Kalau tidak, bisa-bisa Pemda yang jadi sasaran,” ujar Hamid.

Pada berita sebelumnya, dijelaskan bangunan pasar yang dibangun di atas lahan seluas satu hektare tersebut sudah tertutupi semak belukar. Pemerintah daerah¹⁹ saat ini menolak melanjutkan pembangunan dengan menggunakan sistem tahun jamak²⁰. Alasannya pembangunan yang sebelumnya yang dimenangkan PT Mangku Buana Utama Jaya ini ditemukan adanya kelebihan bayar sekitar Rp 2 miliar berdasarkan hasil audit BPKP dengan nilai anggaran Rp 36 miliar.

Hal ini tentunya sangat disayangkan, karena Natuna sendiri belum memiliki pasar yang layak sebagai pusat ekonomi masyarakat. Pasar tradisional yang kini beroperasi merupakan pasar Kecamatan Bunguran Timur yang sudah lama dibangun.

Pemerintah Provinsi pernah berencana melanjutkan pembangunan pasar modern tersebut, namun belum direalisasi. “Kami prihatin saja lihat bangunan di jantung kota Ranai, mestinya dapat tuntas banyak pedagang di sana idamkan. Pasar tradisional sudah tidak lagi mampu menampung pedagang, apalagi bangunannya sudah tua kelola Perusda Natuna, kami jualan di sini sering kuatir,” ujar Martin pedagang pasar tradisional Ranai, Selasa (21/8/2018).

¹⁸ Temuan Pemeriksaan merupakan temuan atau indikasi permasalahan yang diperoleh selama pemeriksaan, yang terkait dengan a. ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penyimpangan dan ketidakpatutan yang material untuk dilaporkan; b. kelemahan SPI yang material untuk dilaporkan; c. kegagalan suatu program yang diperiksa; dan d. ketidaksesuaian kondisi dengan kriteria yang ditetapkan. (Bab II angka 27 Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan)

¹⁹ Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

²⁰ Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa: a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran. (Pasal 27 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

Sebelumnya Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menuturkan kepada media dia menyebutkan, pemerintah daerah bukan tidak ingin melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan. Namun proyek tersebut masih terdapat persoalan kelebihan bayar yang belum selesai. Saat ini, perusahaan yang melaksanakan kegiatan hilang jejak. “Masih dicari perusahaan yang bertanggung jawab, memang sudah ditangani penegak hukum,” ujarnya.

Hamid mengaku kelanjutan pembangunan pasar itu baru bisa dilakukan setelah persoalan hukum selesai. Termasuk proyek gedung DPRD yang mengalami nasib yang sama, terdapat kelebihan bayar dalam kontrak sebesar Rp 2 miliar lebih.

BPKP sendiri sudah melakukan pemanggilan terhadap perusahaan, agar kelebihan bayar dikembalikan ke kas daerah²¹. Menurut berbagai sumber, perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan dari PT Mangkubuana Perkasa. Perusahaan tersebut alami kebangkrutan hingga alamat kantor perusahaan tersebut tutup, atau memang kantor mereka menggunakan alamat palsu, biarlah pihak berwajib yang bekerja.

Sumber Berita:

batampos.co.id, Korupsi Pasar Modern Natuna, Kerugian Negara Mencapai Rp 4 Miliar, Jumat, 24 Agu 2018

<https://batampos.co.id/2018/08/24/korupsi-pasar-modern-natuna-kerugian-negara-mencapai-rp-4-miliar/>

batamtoday.com, Polda Kepri Tetapkan 7 Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Modern Natuna, Kamis, 23 Agustus 2018

<http://batamtoday.com/home/read/115864/Polda-Kepri-Tetapkan-7-Tersangka-Dugaan-Korupsi-Pembangunan-Pasar-Modern-Natuna>

wartakepri.co.id, Pedagang Prihatin Mangkraknya Pasar Modern Natuna 2015 Infonya Sudah Ada Tersangka, Jumat, 23 Agustus 2018

²¹ Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. (Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

<https://www.wartakepri.co.id/2018/08/23/pedagang-prihatin-mangkraknya-pasar-modern-natuna-2015-infonya-sudah-ada-tersangka/>

Catatan: